

Abaikan Fungsi Kontrol Dewan

SINGKAWANG- Dalam PU fraksi DPRD Kota Singkawang tentang pidato pengantar Walikota Singkawang dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, Rabu (20/7), Fraksi Golkar tidak menyampaikan pandangan umumnya. PU sendiri dihadiri sebanyak 17 anggota, dan delapan tidak hadir.

Saat Ketua DPRD Kota Singkawang menunjuk Fraksi Golkar untuk sampaikan PU, salah satu anggota fraksi Reni Asmara Dewi mengatakan Fraksi Golkar tidak sampaikan pandangan umumnya. "Fraksi Golkar tidak sampaikan PU," kata Reni tetap duduk di kursi.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Singkawang, Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya akan mengambil sesi dalam PA saja. Di situlah nantinya, terlihat muatan pemikiran berdasarkan hasil pembahasan per tanggung jawaban tersebut.

"Dalam PU ini dinilai, sebagus apapun dibuat, tidak pernah sama sekali ditanggapi. Jadi dari pada mengukur diri dan buat bingung karena bekerja sendiri tanpa ditanggapi, lebih baik tidak sampaikan," katanya. Menurutnya, diyakini ini bukan cerita dari Fraksi Golkar saja. Tapi PU dari fraksi lain juga tidak pernah digubris Walikota.

"Ini acara seremoni. Padahal di paripurna inilah jiwa apa yang akan dilakukan pemkot ke depannya, artinya, secara umum, DPRD sebagai fungsi kontrol diabaikan," katanya. Seharusnya, lanjutnya, apa yang

Abaikan Fungsi Kontrol Dewan

Sambungan dari halaman 17

disampaikan dalam PU atau paripurna lainnya. Menjadi catatan wako. Dedi mencontohkan, seperti halnya masalah hutan lindung, pengelolaan aset, walet, SOPD gemuk, IMB menyalahi aturan, serta masih ada permasalahan lainnya. Hingga kini belum ada titik terangnya. Namun, Dedi menyatakan akan datang saat Pandangan akhir fraksi nanti.

Secara keseluruhan dalam rapat kemarin, Fraksi DPRD Kota Singkawang mendesak Walikota menyelesaikan masalah aset. Karena tiap tahunnya, hal ini menjadi momok penilaian Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan data yang disampaikan anggota DPRD Kota Singkawang, daftar tanah yang belum didukung dengan hak yang memadai sebanyak 154 lokasi. Dengan luas 1,801 meter persegi lebih dengan nilai lebih dari Rp26 miliar.

Kemudian tanah yang masih dalam proses sertifikasi

37 lokasi dengan luas 306,951 meter persegi, dengan nilai lebih dari Rp5 miliar. Serta 111 lokasi tanah dengan luas 1.481.898 meter persegi masuk dalam daftar tanah yang belum disertifikasi dengan Rp18 miliar.

Fraksi Amanat Kebangkitan Sejahtera Daerah, melalui juru bicaranya Paryanto menyebutkan sebagaimana LHP BPK RI. Dinilai Pemkot masih lemah dalam pengamanan aset, khususnya tanah. Karena masih banyak sekali yang belum diproses pengurusan sertifikatnya.

"Apabila ini dibiarkan, tidak segera disertifikasi, maka tanah Pemkot ini rawan sekali diklaim oleh pihak lain, yang pada akhirnya merugikan keuangan daerah," kata Paryanto.

Menurutnya, kejadian ini bisa dikatakan salah satu indikator kinerja Kepala SKPD. Dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tidak mampu melakukan pensertifikatan dan pengamanan aset daerah.

Maka dalam jangka waktu tertentu. Dapat diberikan sanksi, dan sebaliknya. Jika berhasil maka diberikan penghargaan.

"Harus jelas, apakah Kepala SKPD terkait tersebut bisa melakukan penstifikasian dan pengamanan aset. Kalau tidak diberikan sanksi," katanya.

Karena memang, lanjutnya, LHP BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkot Singkawang tahun anggaran 2010. Diberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti laporan keuangan masih perlu dibe-nahi dan diperbaiki.

"Salah satunya adalah masalah aset, kalau sudah dibenahi. Dimungkinkan pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan mendapat opini yang lebih baik yakni Wajar Tanpa Pengecualian," katanya. Beberapa fraksi lainnya juga mensoroti hal sama. Diantaranya adalah Fraksi PDI Perjuangan. Melalui jubirnya, Victorianus menyatakan pemerintah Kota Singkawang, diharapkan segera menuntaskan masalah aset. Baik itu

yang tetap maupun bergerak. Karena ini menjadi perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya.

"Diharapkan wako segera menuntaskan masalah aset ini, karena inilah yang menjadi momok dari pemeriksaan yang dilakukan BPK," katanya.

Sehari sebelumnya, Walikota Singkawang, Hasan Karman menyatakan dalam hal penyelesaian aset. Pihaknya sudah berusaha menyelesaikan masalah ini.

Bahkan sudah melemparkan ke provinsi untuk menjadi mediasi. Karena, jika dua kabupaten atau kota sudah tidak bisa menemukan kata sepakat, provinsi bisa membantu. Termasuk juga masalah tapal batas.

"Kita sudah sampaikan, dan sekarang kita tinggal menunggu. Artinya bukan wewenang pemkot Singkawang lagi. Karena kita tidak bisa memerintah daerah tetangga (kabupaten induk), dan juga tidak bisa intervensi provinsi," katanya. (fah)